

**PANDANGAN PUBLIK TERHADAP  
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**KARINA HARTANTI**  
**NIM. C2C309024**

**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Karina Hartanti

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PANDANGAN PUBLIK TERHADAP  
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Dosen Pembimbing : Anis Chariri, SE, M.Com., Ph.D, Akt

Semarang, 25 Agustus 2011

Dosen Pembimbing,

(Anis Chariri, SE, M.Com., Ph.D, Akt)

NIP. 196708091992031001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Karina Hartanti

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309024

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PANDANGAN PUBLIK TERHADAP  
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 12 September 2011

Tim Penguji

1. Anis Chariri, SE, M.Com., Ph.D, Akt (.....)

2. Drs. P. Basuki H. P., MBA. M.Acc (.....)

3. Hj. Siti Mutmainah, SE, M.Si., Akt (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya Karina Hartanti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Agustus 2011

Yang membuat pernyataan,

Karina Hartanti

---

C2C309024

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### *MOTTO :*

- ❖ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang engkau kerjakan ” (Q.S. Al Mujadillah : 22)
- ❖ Barang siapa menghendaki kesejahteraan hidup di dunia, maka harus ditempuh dengan ilmu dan barang siapa menghendaki kebahagiaan hidup di akherat hendaklah ditempuh dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka hendaklah ditempuh dengan ilmu “ (Hadist Nabi )
- ❖ Hidup yang sebenarnya adalah ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain.

### **Karya ini kupersembahkan untuk :**

- Bapak & Ibuku Tercinta
- Kedua Kakakku
- Saudara-saudaraku
- Seluruh teman-teman
- Almamaterku

## ABSTRAK

Penelitian ini adalah eksplorasi empiris yaitu suatu usaha untuk memahami persepsi akuntabilitas dalam pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Penting bagi perkembangan pemerintahan yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir, mengubah konteks pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini tepat dilakukan untuk mempelajari konteks akuntabilitas sektor publik yang telah berubah.

Data diperoleh dengan menggunakan kuesiner yang memuat 12 item pertanyaan yang dikumpulkan melalui survei. Sebuah instrumen survei dibagikan kepada 100 responden yang terdiri dari masyarakat dan pegawai pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan *analisis faktor*, empat faktor yang dihasilkan mengungkap item yang dianggap publik menjadi elemen penting dalam akuntabilitas.

Hasil penelitian ditemukan adanya empat faktor besar yang membentuk akuntabilitas, antara lain informasi, kepatuhan hukum, nilai-nilai personal, dan hubungan. Artinya bahwa didalam laporan pertanggungjawaban harus mengandung informasi yang jelas dan terbuka, adanya kepatuhan terhadap hukum, jujur dan objektif, serta didasarkan pada hubungan antara berbagai pemangku kepentingan. Akuntabilitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah menurut pandangan publik dinilai masih rendah. Hal ini karena masih banyaknya laporan pertanggungjawaban yang menitikberatkan pada nilai internal yang didasarkan pada persyaratan kepatuhan hukum diatas nilai-nilai personal untuk pelayanan publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Informasi, Kepatuhan Hukum, Nilai-Nilai Personal, Hubungan.

## ***Abstract***

*This result empirical exploratory is an attempt to understand the perception of accountability in local government in the province of Central Java. It is important to governance development which emerged in recent years, changing the context of public accountability of government to become an obligations that must be done. This is exactly done to study the context of public sector accountability has changed.*

*Data obtained using questioner that contain 12 items collected through the surveyquestions. A survey instrument were distributed to 100 respondents consisting of community and government officials in Central Java province. Using factor analysis, four factors produced uncover items that are considered to be an important element of public accountability.*

*The result of the study found that four major factors that form of accountability, among other information, legal compliance, personal values, and stewardships. This means that in the accountability report must contain information that is clear and open, the adherence to legal, honest and objective, and based on the relationship between the various stakeholders. Accountability of local government in central Java province according to public view is still considered low. This is because there are many reports of accountability that focuses on the internal value that is based on legal compliance requirements on personal values to public service.*

*Keywords : Accountability of Local Government, Information, Legal Compliance, Personal Values, Stewardships.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan Judul **“Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah”**, akhirnya dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program sarjana (S1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si.,Akt.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Anis Chariri, SE, M.Com., Ph.D, Akt selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia mencurahkan waktu untuk membimbing, memberi arahan serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Terima Kasih.
3. Bapak Tri Jatmiko, SE, Msi, Akt selaku Dosen Wali dan Segenap Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.

4. Bapak Djunaidi (Wakil Ketua DPRD Kota), Mas Agung Purna Sarjana, dan semua Anggota Dewan Kota Semarang yang telah bersedia memberikan waktu dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pegawai Dinas Sosial dan Disperindag Prov. Jateng, terima kasih atas semua bantuannya.
6. Drs. M. Santoso, Msi (Sekretaris Dinas Dinperindag Prov.Jateng), terima kasih mas buat bantuan, bimbingan serta semangat dan dorongannya.
7. Mas Hari (Direktur Bea Cukai Jakarta), terima kasih atas bimbingan jarak jauhnya.
8. Untuk Ayah & Ibuku Tercinta, Makasih untuk cinta, doa dan dukungannya selama ini, hingga aku bisa “tetap berdiri dan terus berjalan”. Aku Sayang Kalian Selalu.
9. Buat kakakku Bruri & Suryo, makasih ya slalu ada untuk aku.
10. Buat Mbak Sofi, Budhe dan semua saudaraku yang selalu mendoakan dan memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Buat sahabatku linda, astri, monik, mbak anie, mas sigit dan temen-temen seperjuangan UNREG 2 (Undip Reguler 2), terima kasih atas kebersamaan, semangat dan bantuannya selama ini. Semangat-semangat, semoga bisa wisuda sama-sama ya.
12. Buat mas Theo yang slalu sabar kasih aku masukan, ilmu dan motivasi sampai saat ini, terima kasih banyak.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat-Nya pada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya kecil yang berguna bagi kita semua. Amien.

Semarang, 25 Agustus 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRAK</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
	2.1 Landasan Teori.....	8
	2.1.1 Teori Agensi.....	8
	2.1.2 Pengertian Akuntabilitas .....	9
	2.1.3 Bentuk Akuntabilitas.....	13
	2.1.4 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas di Indonesia .....	18
	2.2 Penelitian Terdahulu .....	22
	2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
	2.4 Hipotesis.....	25
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
	3.1 Desain Penelitian dan Definisi Operasional.....	26
	3.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
	3.2 Populasi dan Penentuan Sampel .....	27
	3.2.1 Populasi .....	27
	3.2.2 Sampel .....	27
	3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
	3.4 Metode Analisis Data.....	29
	3.4.1 Uji Kualitas Data .....	29

3.4.1.1	Uji Validitas.....	30
3.4.1.2	Uji Reliabilitas.....	30
3.4.2	Teknik Analisis Faktor.....	31
3.4.2.1	Pengujian KMO dan Bartlett's.....	31
3.4.2.2	Pengujian Ekstraksi Faktor.....	32
3.4.2.3	Pengujian Component Matrix.....	32
3.4.2.4	Rotasi Faktor.....	32
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	33
4.2	Identitas Responden .....	33
4.2.1	Jenis Kelamin Responden.....	33
4.2.2	Pendidikan Responden .....	34
4.2.3	Pekerjaan Responden.....	35
4.3	Pengujian Validitas dan Rentabilitas .....	35
4.3.1	Uji Validitas.....	35
4.3.2	Pengujian Reliabilitas .....	37
4.4	Analisis Faktor .....	38
4.4.1	KMO.....	38
4.4.2	Bartlett Test .....	39
4.4.3	Proses Ekstraksi Faktor .....	40
4.4.4	Rotasi Faktor .....	42

	4.5 Pembahasan.....	46
BAB V	PENUTUP.....	50
	5.1 Kesimpulan .....	50
	5.2 Keterbatasan .....	51
	5.3 Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin .....	34
Tabel 4.2	Distribusi Responden Menurut Pendidikan .....	34
Tabel 4.3	Distribusi Responden Menurut Pekerjaan.....	35
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Validitas.....	36
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Reliabilitas .....	37
Tabel 4.6	Hasil Pengujian KMO dan Bartlett's .....	38
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Anti-Image Correction.....	39
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Ekstraksi Faktor .....	41
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Component Matrix.....	42
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Rotated Component Matrix .....	43
Tabel 4.11	Interpretasi Faktor .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian Teoritis.....	24
------------	-----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Kuesioner Penelitian .....	57
Lampiran B	Daftar Tabulasi .....	60
Lampiran C	Identitas Responden .....	63
Lampiran D	Hasil Persebaran Jawaban Responden .....	64
Lampiran E	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas .....	67
Lampiran F	Hasil Analisis Faktor.....	69

\

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Berbeda dari pengertian responsibilitas yang lebih menekankan pada sikap dan tindakan yang harus dilakukan dalam menyikapi persoalan krusial di internal dan eksternal organisasi (tanggung jawab sosial), akuntabilitas lebih terkait dengan tanggung jawab keuangan: dimana sumber keuangan didapat, bagaimana penganggaran, peruntukan dan mekanisme pelaporannya. Akuntabel berarti administrasi tertib, wajar, transparan dan dapat diaudit sewaktu-waktu (Alfian, 2009).

Di Indonesia pengelolaan keuangan berbasis kinerja mulai diwajibkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum dilakukan secara maksimal. Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Mochtar

Husein, dari 435 LKPD tahun anggaran 2009 yang diaudit BPK, baru 15 LKPD yang memperoleh opini “wajar tanpa pengecualian” (WTP). Sedangkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tahun 2010 baru mencapai 16,27 persen dari target 20 persen. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja yang diperoleh pemerintah daerah belum sesuai harapan dan masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius lagi ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)).

Melihat kenyataan tersebut, diharapkan agar seluruh instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah harus sudah memiliki indikator kinerja utama (IKU) sampai unit kerja terendah. Hal ini perlu dilakukan, mengingat kelemahan yang dijumpai dalam evaluasi, umumnya masalah pengukuran kinerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengakui sebagian besar instansi pemerintah belum memiliki seperangkat indikator kinerja utama, yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi dan unit-unit kerjanya. Dalam hal kuantitas, jumlah instansi pemerintah yang mengembangkan IKU memang sudah banyak meningkat, akan tetapi secara kualitas masih belum menggembirakan ([www.harianpelita.com](http://www.harianpelita.com)).

Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horisontal di mana pemerintah daerah bertanggungjawab baik terhadap DPRD maupun pada masyarakat luas (*dual horizontal accountability*). Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat

menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD daripada masyarakat luas (Mardiasmo, 2003).

Terdapat beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah: rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar azas akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat, dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor punishment jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi. Semua hambatan tersebut pada dasarnya akan dapat terpecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya implementasi akuntabilitas disamping faktor moral individu pelaksana untuk menjalankan ke pemerintahan secara amanah ([www.itjen.depkominform.go.id](http://www.itjen.depkominform.go.id)).

Beberapa penelitian tentang akuntabilitas telah banyak dilakukan, seperti Tan dan Alison (1999). Mereka menyimpulkan bahwa seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Teclock dan Kim (1987) meneliti pengaruh akuntabilitas

terhadap proses kognitif seseorang. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa subjek yang diberikan instruksi diawal (*postexposure accountability*) bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan, melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, memberikan respon yang lebih tepat dan melaporkan keputusan yang lebih realistis. Sejalan dengan penelitian Teclock dan Kim (1987), Meissier dan Quilliam (1992) juga meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang dalam bekerja. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa subjek dengan akuntabilitas tinggi melakukan proses kognitif yang lebih lengkap.

Cloyd (1997) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian Cloyd (1997) membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan yang dihadapi tinggi. Penelitian Cloyd (1997) ini dikembangkan oleh Tan dan Alison (1999) dengan menilai kualitas hasil kerja berdasarkan kompleksitas kerja yang dihadapi. Hasil penelitian Tan dan Alison (1999) ini tidak konsisten dengan Cloyd (1997). Tan dan Alison (1999) membuktikan bahwa akuntabilitas (secara langsung) tidak mempengaruhi kualitas hasil kerja baik untuk pekerjaan dengan kompleksitas kerja rendah, menengah ataupun tinggi. Namun demikian, penelitian tersebut cenderung mengabaikan isu yang berkaitan dengan pandangan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Kelemahan dan ketertinggalan sektor publik dari sektor swasta memicu munculnya reformasi pengelolaan sektor publik dengan meninggalkan administrasi tradisional dan beralih ke *New Public Management* (NPM), yang memberi perhatian lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas, dengan mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta ke dalam sektor publik. Oleh karena itu, publik memiliki hak untuk menilai seberapa akuntabel pemerintah dalam mengelola kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Banyak literatur akuntabilitas normatif dan sangat sedikit penelitian empiris yang telah dilakukan untuk meneliti pemahaman akuntabilitas yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Kluvers dan Tippet (2010) yang melakukan riset di Australia. Mereka meneliti pemahaman masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah di Victoria apakah masih bersifat internal yaitu hanya mematuhi persyaratan kepatuhan hukum atau telah terjadi perubahan yang mengandung nilai-nilai personal yaitu menekankan pada pelayanan publik. Dengan belum adanya penelitian yang dilakukan di Indonesia terutama di Pemerintah Kota Semarang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “**Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah**”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penelitian dirumuskan untuk dimaksudkan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah publik memandang konsep akuntabilitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah pandangan tersebut terfokus pada akuntabilitas internal atau menyangkut nilai-nilai personal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pandangan publik terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk menguji aspek-aspek nilai yang kemungkinan mempengaruhi akuntabilitas pemerintah daerah.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan dalam penelitian ini berupa kontribusi empiris, teori dan kebijakan, yaitu (1) kontribusi empiris pandangan publik terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; (2) kontribusi kebijakan untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang; (3) kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkan kerangka teori dan menarik hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai dan sampel data yang lebih terperinci.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memperlihatkan hasil-hasil dari penelitian berupa deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi yang dibuat.

### **BAB V PENUTUP**

Ditutup dengan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Hubungan agensi muncul ketika satu pihak (prinsipal) memberi kewenangan penuh pada pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa dan mendelegasikan otoritas dan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Scott, 2002; Triyuwono dan Roekhudin, 2000; Komalasari, 1999). Implikasi atas pendelegasian ini tentu saja agen harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada prinsipal. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing (Scott, 2000; Komalasari, 1999). Hubungan keagenan muncul manakala satu agen (prinsipal) memberikan amanah pengelolaan sumber daya ke pihak lain (agen), yang menuntut agen untuk memberikan kewenangan penggunaan sumber daya tersebut kepada agen (Kaplan dan Anthony, 1998).

Dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi ini muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka DPRD itu sendiri merupakan agen dari publik/warga yang ada dalam daerah tersebut. Dalam hubungan agensi yang terakhir ini, publik/warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD (agen) untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas menjadi suatu konsekuensi logis adanya hubungan antara agen dan prinsipal.

Gray dan Bill (1993) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut kepada pihak yang mempercayai kepadanya suatu tanggungjawab. Gregory (1995) sebagaimana yang dikutip oleh Jacobs (2000) menjelaskan bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai ” *the need to give an account of one’s actions.*” Hal senada juga dijelaskan oleh Jones (1991).

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas ini, penetapan mekanisme pemeriksaan sangat penting dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh agen benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Triyuwono dan Roekhudin, 2000). Mekanisme akuntabilitas dalam hal ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Pengawasan yang independen terhadap keakuratan informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen dapat mengurangi resiko *stakeholders* terkait dengan adanya kos agensi (Otley dan Bernard, 1996).

### **2.1.2 Pengertian Akuntabilitas**

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1987).

Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan betapa sejumlah organisasi telah memperlihatkan bahwa mereka sudah memenuhi misi yang mereka emban (Guy, 1991). Pada tahun yang sama, Carino, mengatakan bahwa akuntabilitas

merupakan suatu evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggungjawab dan kewenangannya. Ada empat dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain, yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri.

Dalam penelitian Kluvers dan Tippet, akuntabilitas dikatakan sebagai konsep yang sangat rumit. Akuntabilitas telah mengalami pergeseran makna dimana akuntabilitas dahulu menekankan pada nilai internal yaitu laporan pertanggungjawaban dibuat hanya untuk mematuhi persyaratan hukum. Sedangkan makna akuntabilitas sekarang menekankan pada nilai-nilai personal yaitu lebih kepada pelayanan pihak-pihak yang terkait dimana laporan pertanggungjawaban yang dibuat harus mengandung informasi yang jujur, objektif dan transparan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggung jawabkannya kepada orang-orang yang memberinya kepercayaan.

Menurut Tim Studi Akuntansi Keuangan Pemerintah BPKP seperti yang dikutip Rosjidi (2001:144) makna akuntabilitas berarti perwujudan kewajiban-kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atas kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Saleh dan Iqbal (1995) juga berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia. Akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks instansi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai amanat (Rasul, 2003).

Pengertian lain dari akuntabilitas menurut Lawton dan Rose dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka (YPAPI, 2004).

Menurut Mardiasmo (2005) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas

(*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing (Toha, 2007).

Definisi yang sama disebutkan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya (fiscal, manajerial, dan program). Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008).

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Dari berbagai definisi akuntabilitas seperti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik ([www.pusdiklatwas.bpkp.go.id](http://www.pusdiklatwas.bpkp.go.id)).

### **2.1.3 Bentuk Akuntabilitas**

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi (2001:145) jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu :

1. Akuntabilitas Internal.

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP).

2. Akuntabilitas Eksternal.

Melekat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Saleh dan Iqbal (1995) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-Nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2005) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Ellwood (2003) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

## 2. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

## 3. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

## 4. Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas ke atas (*upward accountability*), menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif, seperti seorang dirjen kepada menteri.
2. Akuntabilitas keluar (*outward accountability*), bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.

3. Akuntabilitas ke bawah (*downward accountability*), menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagai apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai (YPAPI, 2004).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya Akuntabilitas dan Good Governance (2000:24), membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

- a. Integritas Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Pengungkapan

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.

c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya *output*, tapi sampai *outcome*. *Outcome* adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. *Outcome* lebih tinggi nilainya daripada *output*, karena *output* hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan *outcome* mengukur *output* dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran *outcome* memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif

terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

### 3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas di Indonesia**

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP (2000:43) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah :

1. Menentukan tujuan (*goal*) yang tepat.
2. Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan (*goal*) tersebut.
3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
4. Mengembangkan standar dan operasi secara ekonomi dan efisien.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangka waktu (*time frame*) tertentu. Dalam upaya untuk menentukan tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibuat suatu standar mengenai tingkat pencapaian yang dikehendaki. Ini berarti diperlukan suatu tolak ukur untuk menentukan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan yang

ditetapkan sejak awal. Agar dapat berfungsi dengan baik, dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas, perlu diterapkan :

1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran dari kebijakan dan program.

Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah mengembangkan suatu pernyataan tujuan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan yang dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur.

2. Pola pengukuran tujuan.

Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan dengan mengarah pada pola pencapaian tujuan dan hasil. Ini adalah tugas yang paling kritis dan sangat sulit dalam menyusun suatu sistem akuntabilitas. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program membutuhkan cara-cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dan mencapai hal yang dibagikan oleh pembuat kebijakan.

3. Pengakomodasian sistem insentif.

Pengakomodasian sistem yang insentif merupakan suatu sistem yang perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem insentif harus

dilakukan dengan hati-hati. Adakalanya sistem insentif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.

4. Pelaporan dan penggunaan data.

Suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pimpinan, pembuat keputusan, manajer-manajer program dan masyarakat. Bentuk dan isi laporan harus dipertimbangkan sedemikian rupa, ini merupakan pedoman pelaporan informasi dalam suatu sistem akuntabilitas.

5. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas.

Pengembangan sistem akuntabilitas harus dilakukan dengan cara yang terkoordinasikan, tidak secara independen program demi program. Akuntabilitas juga menyajikan *deviasi* (selisih, penyimpangan) antara realisasi kegiatan dengan rencana dan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Di Indonesia, kewajiban instansi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan perencanaan strategi;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Di Indonesia penelitian mengenai akuntabilitas di sektor publik masih sangat kurang. Teclock dan Kim (1987) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa subjek yang diberikan instruksi diawal (*postexposure accountability*) bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan, melakukan proses kognitif yang lebih lengkap, memberikan respon yang lebih tepat dan melaporkan keputusan yang lebih realistis. Sejalan dengan penelitian Teclock dan Kim (1987), Meissier dan Quilliam (1992) juga meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap proses kognitif seseorang dalam bekerja. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa subjek dengan akuntabilitas tinggi melakukan proses kognitif yang lebih lengkap.

Cloyd (1997) meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil penelitian Cloyd (1997) membuktikan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa kompleksitas pekerjaan

yang dihadapi tinggi. Penelitian Cloyd (1997) ini dikembangkan oleh Tan dan Alison (1999) dengan menilai kualitas hasil kerja berdasarkan kompleksitas kerja yang dihadapi. Seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Hasil penelitian Tan dan Alison (1999) ini tidak konsisten dengan Cloyd (1997). Tan dan Alison (1999) membuktikan bahwa akuntabilitas (secara langsung) tidak mempengaruhi kualitas hasil kerja baik untuk pekerjaan dengan kompleksitas kerja rendah, menengah ataupun tinggi.

Penelitian empiris tentang pelaporan akuntabilitas di Indonesia juga dilakukan oleh Ahmad Solikin tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah dalam melaporkan laporan akuntabilitas (kinerja) di departemen-departemen di Indonesia terdapat pernyataan yang melebih-lebihkan hasil kinerja mereka. Objek penelitian ini adalah tiga puluh dua departemen kementerian yang ada di Indonesia yang melaporkan laporan akuntabilitas pada tahun 2002. Penelitian ini menggunakan *content analysis* untuk mengukur kualitas laporan akuntabilitas tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan unit organisasi cenderung untuk melaporkan kinerja mereka secara tinggi. Hal ini berarti bahwa kebanyakan unit organisasi menjunjung dirinya sendiri untuk kinerja yang baik dan menyalahkan faktor luar jika terjadi kegagalan dalam kinerja mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury et al., (2005) menggunakan dimensi pelaporan, akuntabilitas dan konsep-konsep audit yang terdiri dari independensi

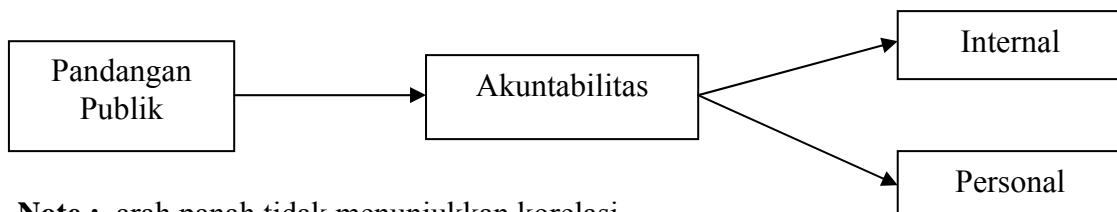
auditor, kompetensi auditor, materialitas, bukti audit, pendapat wajar dan audit kinerja. Penelitian juga dilakukan oleh Yuliati et al., (2007) dengan menggunakan responden auditor pemerintah dan pengguna laporan keuangan daerah yaitu pemda dan anggota dewan. Penelitian yang menguji apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan pernah dilakukan oleh Sopanah (2002), Isma Coryanata (2007), serta Simson et al., (2007).

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horisontal di mana pemerintah daerah bertanggung jawab baik terhadap DPRD maupun pada masyarakat luas (*dual horizontal accountability*). Adanya reformasi sector publik menjadikan pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Berikut gambar yang menunjukkan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



**Note :** arah panah tidak menunjukkan korelasi.

## **2.4 Hipotesis**

Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Penelitian ini bukan merupakan *Explanatory theory* yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Umar, 1999: 36). Penelitian ini bersifat eksploratoris, yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk mencari ide-ide atau hubungan-hubungan yang baru. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan hipotesis.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian dan Definisi Operasional**

Desain penelitian ini adalah penelitian eksplorasi dengan menggunakan kuesioner yang dikumpulkan melalui survei. Penelitian eksplorasi dilakukan apabila peneliti memiliki keterbatasan informasi mengenai masalah penelitian tertentu, karena belum banyak literatur yang membahas masalah tersebut. Studi eksplorasi ini bertujuan untuk memahami karakteristik fenomena atau masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini tidak memiliki variabel dependen maupun independen karena tidak menggambarkan adanya hubungan sebab akibat. Pelaksanaan metode penelitian eksplorasi ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut. Selain itu semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 12 pertanyaan yang terkait dengan pandangan publik terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah. Masing-masing pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi menjadi 4 tingkatan yaitu poin 1 Sangat Tidak Setuju (STS), poin 2 Tidak Setuju (TS), poin 3 Setuju (S), dan poin 4 Sangat Setuju (SS).

### **3.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan waktu penyebaran kuesioner penelitian yaitu tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan 24 Juli 2011.

## **3.2 Populasi dan Penentuan Sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Indriantoro (1999) menyatakan bahwa populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Dalam sebuah penelitian, terkadang memiliki populasi yang sangat luas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diadakan batasan terhadap populasi yang dijadikan daerah penelitian. Untuk dapat diketahui populasinya perlu ditentukan batas-batas populasi yang tegas, yang oleh penulis diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pegawai pemerintah kota Semarang yang terdiri dari anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Mahasiswa.

### **3.2.2 Sampel**

Mengingat terbatasnya dana, waktu, dan tenaga maka tidak semua jumlah populasi diteliti sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan sampel dalam penelitian. Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi

(Sekaran, 2006). Sampel mewakili keseluruhan populasi yang ada. Dari sampel tersebut, akan mempermudah dalam melakukan analisis dan mendapatkan kesimpulan.

Dalam penelitian ini ditentukan dari populasi tersebut sebuah sampel yang dipandang *representative*, yaitu sample yang dapat mewakili keseluruhan dari populasi yang akan diteliti. Sedangkan metode yang akan digunakan untuk menentukan sampel yang *representative* disebut *purposive non random sampling*, yaitu suatu sampel yang tidak memberikan kemungkinan yang sama bagi setiap unsur populasi (Narbuko, 2003).

Terhadap sampel tersebut diatas, peneliti menyadari kemungkinan adanya perubahan didasarkan pada situasi pada saat penelitian ini dilaksanakan. Sampel diambil dari populasi penelitian yang meliputi anggota DPRD, pegawai pemerintah (PNS) dan Mahasiswa. Hal ini dikarenakan ketiganya dipandang sebagai pihak prinsipal sehingga memiliki hak untuk menilai seberapa akuntabel pemerintah daerah (agen) dalam mengelola kepercayaan yang telah mereka berikan.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang cukup lengkap dan relevan dengan pokok masalah yang dibahas, maka cara yang dipakai untuk mengumpulkan data tersebut adalah menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti setelah mengadakan suatu penelitian ke lapangan yaitu langsung ke obyek yang menjadi pokok permasalahan. Untuk mendapatkan data primer ini, penulis

menggunakan metode kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang responden. Dalam metode kuesioner ini, data diperoleh langsung melalui daftar pertanyaan yang ditujukan pada masyarakat dan pegawai pemerintah kota Semarang yang terdiri dari anggota DPRD, Pegawai Pemerintah (PNS), dan Mahasiswa. Responden diberi waktu selama satu hingga dua minggu untuk mengisi kuesioner dan kemudian kuesioner tersebut dikembalikan kepada peneliti.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Kuesioner dengan skala Likert adalah instrument yang umumnya digunakan untuk meminta responden agar memberikan respon terhadap beberapa statement dengan menunjukkan apakah dia sangat setuju, setuju, tidak menentukan, tidak setuju, dan sangat tidak setuju terhadap tiap-tiap statement (Sumanto, 1995: 66). Data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Pengolahan data menggunakan SPSS 16.

#### **3.4.1 Uji Kualitas Data**

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner didasarkan dari asumsi dan pendapat dari penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan variabel yang sama. Hal tersebut tidak menjamin alat analisis dapat diterapkan pada setiap penelitian. Oleh karena itu, akan lebih baik jika alat analisis

diuji kemampuannya dalam menjelaskan tiap variabel. Uji yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

#### **3.4.1.1 Uji Validitas**

Dalam penggunaan alat analisis kuesioner, maka uji validitas wajib untuk dilakukan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2005). Valid yang dimaksud terlihat dari pertanyaan pada kuesioner, pertanyaan tersebut harus dapat menggambarkan sesuatu yang akan diukur.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa faktor yaitu menggunakan metode korelasi tunggal *product moment pearson*. Adapun kaidah yang berlaku dalam pengujian validitas ini adalah sebagai berikut:

- Jika  $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$  pada  $\alpha = 0,05$ , maka butir tidak valid
- Jika  $r\text{-hitung} \geq r\text{-tabel}$  pada  $\alpha = 0,05$ , maka butir valid

#### **3.4.1.2 Uji Reliabilitas**

Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Peneliti menggunakan metode *internal consistency* dengan menggunakan *croncbach's alpha*. Suatu variabel

dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60 (Nunnally, 1967).

### **3.4.2 Teknik Analisis Faktor**

Dalam penelitian ini teknik analisis faktor diuji dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator (autonom 1 sampai autonom 4) yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk maka akan memiliki nilai *loading factor* yang tinggi. (Ghozali, 2005). Beberapa tahap uji test yang dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis faktor diantaranya adalah dengan pengujian KMO dan Bartlett's, pengujian Ekstraksi Faktor, pengujian Component Matrix, dan Rotasi Faktor.

#### **3.4.2.1 Pengujian KMO dan Bartlett's**

Kesimpulan tentang layak-tidaknya analisis faktor dilakukan, baru sah secara statistik dengan menggunakan uji KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin*) dan *Barlett Test of Sphericity*. Uji KMO yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1 mempertanyakan kelayakan (*appropriateness*) analisis faktor. Apabila nilai indeks tinggi (berkisar antara 0,5 sampai 1,0), analisis faktor layak dilakukan. Sebaliknya, kalau nilai KMO di bawah 0,5 analisis faktor tidak layak dilakukan.

### **3.4.2.2 Pengujian Ekstraksi Faktor**

Dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap faktor mewakili variabel-variabel yang dianalisisnya. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya varians yang dijelaskan, yang disebut juga *eigenvalues*.

### **3.4.2.3 Pengujian Component Matrix**

Uji ini dilakukan untuk mengelompokkan variabel-variabel setiap faktor yang terbentuk. Ketika terjadi ketidakjelasan keanggotaan masing-masing faktor maka perlu dilakukan rotasi faktor.

### **3.4.2.4 Rotasi Faktor**

Merupakan alat penting untuk interpretasi faktor. Tujuan adanya rotasi ini adalah untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu. Ada beberapa metode rotasi yaitu rotasi orthogonal yang memutar sumbu  $90^\circ$  dan rotasi oblique yang memutar sumbu kekanan tetapi tidak harus  $90^\circ$ . Proses rotasi orthogonal dapat berbentuk Quartimax, Varimax, dan Equamax. Setelah diketahui kelompok variabel dari setiap faktor maka tahap selanjutnya dapat dilakukan interpretasi faktor.